

**JANGKAUAN PROGRAM TUMPANGSARI TERHADAP ORANG MISKIN :
SEBUAH PROGRAM CONTOH DARI TIGA DESA HUTAN
DI WILAYAH KPH BANYUMAS TIMUR
(THE OUTREACH OF TUMPANGSARI PROGRAMME TO POOR PEOPLE:
AN EXAMPLE FROM THREE FOREST VILLAGES IN EAST BANYUMAS
FOREST DISTRICT)**

Oleh :

Slamet Rosyadi

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed
Mitarbeiter (co-worker) pada Institute of Rural Development,
Göttingen University, Jerman**

(Diterima : 25 Juni 2001, disetujui : 30 Juli 2001)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi jangkauan program tumpangsari terhadap orang miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak orang yang layak untuk mendapatkan program tetapi berada di luar program. Hal ini terjadi karena proses pembagian lahan yang tidak diawali dengan penilaian kelayakan klien. Agar jangkauan program tumpangsari mampu mengakomodasi bagian terbesar dari kelompok masyarakat yang paling miskin, perubahan kelembagaan dari status kepemilikan hutan dari kepemilikan negara menjadi kepemilikan masyarakat perlu dipertimbangkan sehingga akses masyarakat miskin terhadap aset sumberdaya hutan akan terbuka lebih lebar sekaligus memupuk rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya hutan.

Kata kunci : jangkauan, program tumpangsari, orang miskin, state property, community property

ABSTRACT

This study on which this article was based was aimed at evaluating the outstretch of the tumpangsari (intercropping) programme to the poor people. The study found that there were still many eligible people beyond the reach of the programme. This was due to the fact that the process of land distribution was not started by an assessment on the eligibility of the prospective participants. If the intercropping programme is to be able to reach the largest portion of the poorest people, changes in institutional aspect and ownership of forests from that of the state to that of the community are worth contemplating so as to open the access to the forest resources to the poor people which in turn would foster the sense of belonging and responsibilities of the people toward the sustainability of forest resources.

Key words : outreach, tumpangsari programme, poor people, state property, community Property

PENDAHULUAN

Laju deforestasi di Indonesia terus meningkat secara dramatis. Pada tahun 1970-an dan 1981 deforestasi tahunan di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 300.000 ha per-tahun menjadi 600.000 ha per-tahun. Pada tahun 1990, laju deforestasi meningkat tiga kali lipat menjadi satu juta ha per tahun (Sunderlin dan Resosudarmo 1996:1). Laju deforestasi terus membengkak hingga menjadi 1,6 juta ha per tahun pada tahun 2000. Tampaknya peningkatan laju deforestasi bertalian dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia semenjak pertengahan 1997. Survei yang dilakukan Sunderlin (1999) menemukan bahwa krisis ekonomi telah mendorong baik yang miskin maupun yang sejahtera menjadi pelaku kerusakan hutan. Oleh karena itu, dalam waktu 10 tahun sejak tahun 1990 laju deforestasi meningkat hingga 60% atau naik hampir empat kali lipat sejak tahun 1980. Akibatnya, luas hutan yang telah rusak mencapai 40,26 juta ha atau 3 kali luas Pulau Jawa.

Di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur, terjadi kasus pencurian yang makin meningkat selama kurun waktu 6 tahun terakhir. Pada tahun 1994, angka pencurian kayu hanya sebesar 2.037 batang. Angka ini cenderung membung hampir 10 kali lipat (19.626 batang) pada tahun 2000. Kondisi ini telah mengakibatkan lahan kosong seluas 1.308,4 ha. Sementara itu, lahan

hutan yang ditumpangsarikan dari tahun 1997 sampai 2000 telah mencapai 3.496,85 ha dan menyerap kurang lebih 13.987 kepala keluarga. Maraknya fenomena pencurian kayu akhir-akhir ini menggambarkan bahwa pembangunan kehutanan selama ini dapat dikatakan gagal dalam membangun hubungan yang seimbang antara hutan dan usernya, yaitu birokrasi perhutani dan masyarakat desa sekitar hutan. Program seperti tumpangsari dalam perhutanan sosial maupun tumpangsari biasa yang telah difasilitasi Perhutani tampaknya belum mampu menciptakan *sense of belonging* dari masyarakat terhadap hutan. Masyarakat desa hutan kerap cenderung tidak dapat berbuat banyak terhadap berbagai tindakan pencurian kayu oleh segelintir anggota masyarakat baik dalam skala kecil maupun besar.

Dalam kondisi demikian, berbagai program pembangunan kehutanan yang telah diimplementasikan menjadi patut untuk dipertanyakan, khususnya dalam dua hal. *Pertama*, apakah program pembangunan telah mampu menjangkau golongan yang sangat miskin (*outreach the very poor*) yang merupakan kelompok yang paling membutuhkan. Studi yang dilakukan Sunderlin (1997) menemukan bahwa beberapa lokasi tumpangsari yang relatif subur justru lebih cenderung diakses oleh mereka yang kondisi sosial ekonominya lebih baik dibandingkan di lokasi yang tidak subur. *Kedua*, lembaga (*institution*) macam apa yang secara

efektif memberikan akses yang luas khususnya kepada masyarakat miskin (*poor people*) untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan tanpa harus merusak ekosistem hutan itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi siapa *klien* program perhutanan sosial; apakah mereka dari kelompok yang paling miskin ataukah mereka yang secara sosial ekonomi lebih baik sehingga diperoleh informasi mengenai daya jangkau program terhadap orang miskin. Penelitian ini juga diharapkan menemukan lembaga yang efektif dan aspiratif sehingga manfaat sumberdaya hutan dapat diakses oleh masyarakat miskin sekaligus mampu menciptakan rasa memiliki pada masyarakat terhadap hutan dan kelestariannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai April 2001 dengan mengambil 3 dusun (*sub-villages*) dari tiga desa sekitar hutan di Kabupaten Banyumas sebagai sampel lokasi penelitian yang diambil secara *purposive*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi desa sekitar hutan cukup bervariasi, baik dari segi tahun pelaksanaan program, tingkat perkembangan sosial ekonomi maupun konflik yang muncul dalam kaitannya dengan keamanan hutan. Oleh karenanya, sampel yang dipilih tidak menunjukkan representasi desa hutan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini memilih sampel dengan mempertimbangkan tiga

spesies tanaman hutan yang berbeda yaitu hutan damar, hutan pinus dan hutan jati. Asumsinya, kondisi kesuburan lahan sedikit banyak dipengaruhi oleh jenis tanaman pokok yang dikembangkan. Lahan tumpangsari yang berada di bawah tegakan pinus, misalnya, ditengarai kurang subur dibandingkan dengan lahan di bawah tegakan jati.

Desain *ex post facto* digunakan dalam penelitian ini karena rancangan itu merupakan satu-satunya pendekatan yang tersedia untuk mencari penjelasan kausalitas antara berbagai variabel yang tidak mungkin dimanipulasi (Cooper dan Emory, 1996:141). Oleh karena data *ex-ante* tidak tersedia, metode *ex-post facto* menghampiri analisis pada dua titik waktu. Pendekatan ini penting dalam kasus yang tidak ada data sosial ekonomi sebelum berpartisipasi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data tentang variabel perubahan lambat tertentu, seperti tingkat pendidikan, kepemilikan sawah dan tanah kering, pada Waktu 2 (T2) yang diasumsikan menunjukkan status sosial ekonomi pada Waktu 1 (T1) (Sunderlin 1997).

Karena metode *ex post facto* yang diterapkan dalam penelitian ini, ukuran minimum sampel yang diambil adalah 15 subyek untuk masing-masing kelompok (peserta program dan non-peserta) (Gay dalam Umar 1998:108). Selanjutnya, sampel diambil dengan menggunakan teknik *proportional stratified random sampling* menurut kepemilikan jenis tanah garapan.

Tabel 1. Stratifikasi Rumah Tangga Peserta dan Bukan Peserta Program Tumpangsari berdasarkan Kepemilikan Jenis Tanah Garapan

Dusun	Rumah Tangga Peserta Program		Rumah tangga bukan peserta program	
	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
A				
Sawah	11	3	11	3
Hanya tanah kering	40	10	27	9
Tidak memiliki tanah garapan	8	2	9	3
Jumlah	49	15	47	15
B				
Sawah	6	4	11	5
Hanya tanah kering	14	10	20	9
Tidak memiliki tanah garapan	8	6	13	6
Jumlah	28	20^{*)}	43	20^{*)}
C				
Sawah	10	2	9	4
Hanya tanah kering	44	11	21	11
Tidak memiliki tanah garapan	7	2	0	0
Jumlah	61	15	30	15
Total sampel		50		50

Keterangan : *) jumlah sampel yang lebih banyak diambil semata-mata didasarkan atas tujuan dan kebutuhan peneliti lainnya dari kegiatan penelitian ini.

Sumber : wawancara dengan kepala dusun dan mandor Perhutani (2000).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang sifatnya terbuka-tertutup dan teknik wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat. Penelitian ini menerapkan teknik statistik deskriptif dan *logistic regression* (Norusis, 1999) untuk menganalisis data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jangkauan Program Tumpangsari terhadap Orang Miskin

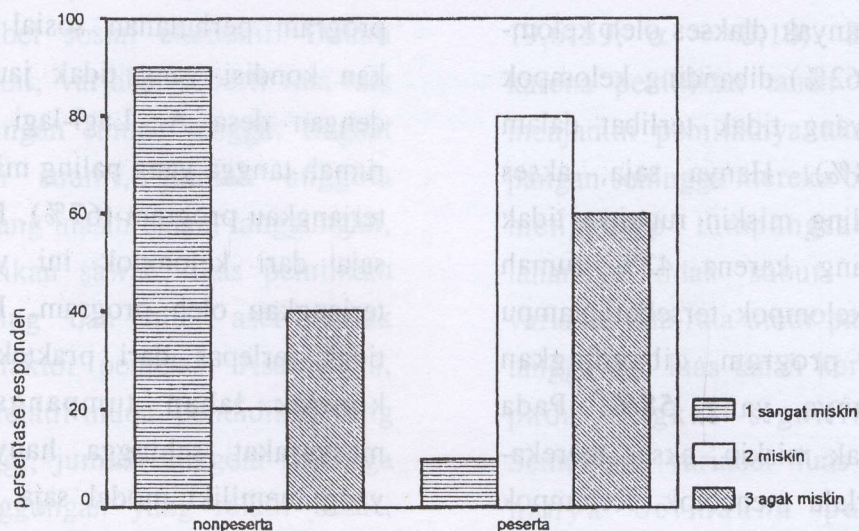
Penelitian di tiga desa hutan yang mendapatkan program tumpangsari memberikan jawaban yang

bertentangan dengan harapan program. Dengan menggunakan ukuran kemiskinan relatif yang dikembangkan oleh CGAP (the Consultative Group to Assist the Poorest), responden penelitian dibagi ke dalam tiga kelompok yang secara luas ditafsirkan dapat mewakili kelompok paling miskin (dikode 1), miskin (dikode 2) dan agak miskin (dikode 3) dengan luas kepemilikan lahan sebagai dasar ukuran kemiskinan relatif. Teknik ini bermanfaat untuk menilai seberapa efektif jangkauan program terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Desa A yang mewakili kegiatan tumpangsari di kelas hutan damar dan tidak subur menunjukkan bahwa akses terhadap program tumpangsari cenderung lebih banyak diakses oleh mereka yang masuk dalam kelompok miskin (80%). Kelompok miskin yang tidak masuk ke dalam program hanya 20%. Yang kontras, kelompok paling miskin ternyata lebih banyak yang tidak terjangkau oleh program (90%) dibandingkan yang ikut program (10%). Gambaran yang tidak begitu mencolok ditunjukkan oleh kelompok agak miskin yang 60%-nya ikut program dan yang tidak ikut 40%.

masyarakat desa sekitar hutan yang haus lahan garapan dan memiliki akses informasi relatif lebih baik mengenai pembukaan lahan hutan untuk tumpangsari relatif diuntungkan.

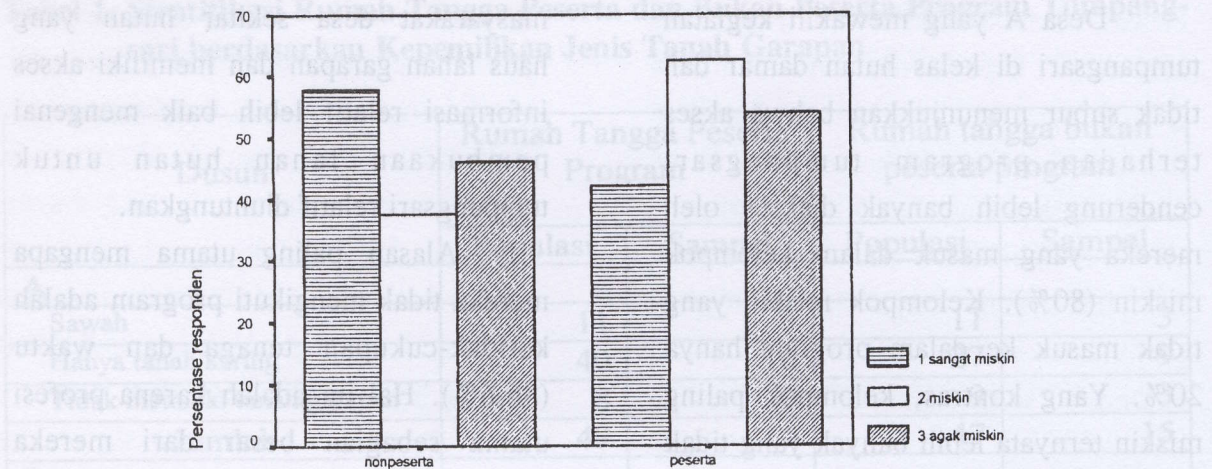
Alasan paling utama mengapa mereka tidak mengikuti program adalah ketidak-cukupan tenaga dan waktu (86,6%). Hal ini adalah karena profesi utama sebagian besar dari mereka adalah penderes gula kelapa. Pekerjaan semacam ini sangat menguras waktu sehingga banyak di antara mereka merasa tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan sampingan sebagai petani hutan atau *pesanggem*. Apalagi proses



Gambar 1. Jangkauan Program Tumpangsari terhadap Orang Miskin di Desa A

Persentase rumah tangga relatif paling miskin yang tidak tercakup oleh program tersebut adalah disebabkan oleh proses perolehan lahan yang tidak diawali dengan identifikasi klien-yang-paling-membutuhkan oleh aparat Perhutani di lapangan. Akibatnya,

perolehan lahan juga dilakukan secara berebut oleh masyarakat, sehingga berlaku prinsip yang cepat dapat bagian lebih banyak. Hanya sebagian kecil menjadikan faktor modal sebagai kendala untuk terlibat dalam program tumpangsari (13,4 %).



Gambar 2. Jangkauan Program Tumpangsari terhadap Orang Miskin di Desa B

Jangkauan program yang terjadi di desa B tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di desa A. Program tumpangsari di lahan hutan jati dan relatif subur lebih banyak diakses oleh kelompok miskin (62%) dibanding kelompok yang sama yang tidak terlibat dalam program (38%). Hanya saja, akses kelompok paling miskin rupanya tidak terlalu timpang karena 42% rumah tangga dari kelompok tersebut mampu menjangkau program dibandingkan dengan sisanya yang 58%. Pada kelompok agak miskin, akses mereka pun tidak terlalu mencolok. Kelompok yang relatif sejahtera tidak tertarik dengan kegiatan tumpangsari karena dipandang belum tentu memberikan hasil yang menguntungkan. Mereka yang ikut dari kelompok ini disinyalir telah membayar "uang pelicin" kepada oknum petugas lapangan Perhutani

sehingga mereka diberikan andil lahan garapan.

Pelaksanaan program tumpangsari di desa C yang berada di bawah program perhutanan sosial menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan desa A. Lagi-lagi, kelompok rumah tangga yang paling miskin belum terjangkau program (67%). Hanya 33% saja dari kelompok ini yang dapat terjangkau oleh program. Kondisi ini tidak terlepas dari praktek jual beli kontrak lahan tumpangsari antar masyarakat sehingga hanya mereka yang memiliki modal saja yang dapat membeli kontrak lahan tersebut (16,7%). Artinya, kontrak lahan yang diterima seseorang kemudian dijual kembali kepada mereka yang belum mendapatkan bagian karena pihak pertama tidak memiliki modal yang cukup untuk menggarapnya.



Gambar 3. Jangkauan Program Tumpangsari terhadap Orang Miskin di Desa C

Keputusan seseorang untuk berpartisipasi atau tidak dalam program tumpangsari dapat ditinjau dari beberapa variabel sosial ekonomi. Dalam penelitian ini, variabel seperti rata-rata umur pasangan rumah tangga, tingkat pendidikan suami, jumlah anggota keluarga yang masih dalam tanggungan, luas pemilikan sawah, luas pemilikan tanah kering dan nilai aset ternak dijadikan faktor penjelas. Asumsinya, usia yang relatif muda, pendidikan yang relatif tinggi, jumlah anggota keluarga dalam tanggungan yang relatif besar, sempitnya pemilikan lahan dan rendahnya nilai aset lainnya menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima di semua lokasi. Namun demikian, hasil penelitian justru menunjukkan

ketidak-konsistenan dengan hipotesis yang dirumuskan. Di desa A, hanya satu variabel luas tanah kering ($B = 19,6159$; $\alpha = 0,10$). Barangkali ini karena pemilikan tanah kering belum menjamin pemiliknya akan kecukupan pangan sehingga mereka berminat untuk menggarap tumpangsari meskipun lahannya tidak subur. Di desa B, variabel rata-rata umur pasangan rumah tangga dan luas tanah kering bermakna pada tingkat signifikansi 95%. Sementara variabel luas tanah sawah hanya bermakna pada tingkat signifikansi 90%. Partisipasi di desa C hanya dapat dijelaskan oleh variabel nilai aset ternak yang dimiliki (signifikan pada tingkat 95%). Mungkin mereka yang berminat pada program mengharapkan akses terhadap pakan ternak yang tersedia melimpah di hutan.

Tabel 2. Analisis Regresi Logistic pada Variabel Status Partisipasi : Apakah Responden Seorang Peserta dalam Program Tumpangsari atau Bukan ? Tiga Desa Hutan Tempat Program Tumpangsari Dilaksanakan

Desa	Jumlah pengamatan	-2 log likelihood	Goodness of fit	Chi-square significance	% Correct partipants	% correct non-partipants	% correct overall
A	30	27,409	24,409	0,0239	80,00	73,33	76,67
B	40	27,509	24,804	0,0063	66,67	73,33	69,70
C	30	26,601	34,488	0,0165	93,33	80,00	86,67

Lokasi	Variabel	B Coefficient	Significance
A	TGA	-1,3977	0,1392
	URP	-0,875	0,3136
	TPRT	-1,8301	0,1537
	LTK	19,6159	0,0721
	LTS	-8,8482	0,4104
	NAT	1,01E-06	0,5223

Lokasi	Variabel	B Coefficient	Significance
B	TGA	-0,1901	0,6413
	URP	-0,1682	0,0368
	TPRT	0,5969	0,2558
	LTK	11,0147	0,0446
	LTS	-16,9752	0,0661
	NAT	1,10E-06	0,1647
C	TGA	0,5445	0,4125
	URP	0,0830	0,2355
	TPRT	1,5455	0,1080
	LTK	-80,5781	0,1243
	LTS	22,9418	0,7728
	NAT	3,18E-06	0,0115

Keterangan : Jumlah anak dalam tanggungan keluarga (TGA), rata-rata usia pasangan rumah tangga (URP), tingkat pendidikan kepala rumah tangga (TPRT), luas tanah kering (LTK), luas tanah sawah (LTS) dan nilai asset ternak (NAT). Sumber : Survey Pribadi, 2001.

Transformasi Kelembagaan Pengelolaan Hutan

Dalam mengkaji apakah kelembagaan program telah memberikan kepuasan kepada pesertanya, penelitian ini mensurvei bagaimana sikap peserta terhadap manfaat program. Data survei menunjukkan bahwa 52% peserta

menyatakan puas dan 2% menyatakan sangat puas. Meskipun demikian, mereka yang tidak puas menduduki persentase yang cukup tinggi, yaitu 42%, sementara yang sangat tidak puas hanya 4%. Artinya, hampir separuh peserta program masih belum merasakan manfaat program khususnya bagi perbaikan

kondisi sosial ekonomi mereka.

Bila dilihat berdasarkan kelompok strata (Tabel 3) menurut kepemilikan lahan, sikap terhadap manfaat program menunjukkan variasi yang cukup menarik. Di kelompok paling miskin, perbandingan mereka yang tidak puas dan puas hampir berimbang yaitu masing-masing 12%. Ini dapat menunjukkan bahwa mereka yang mendapatkan lahan cukup subur dan gangguan hama yang relatif sedikit dapat merasakan manfaat program tumpangsari. Hal yang sebaliknya tidak dirasakan oleh mereka yang mendapatkan lahan yang kurang bahkan tidak subur serta tingginya gangguan hama.

terhadap manfaat program (24%). Hal ini tidak begitu mengejutkan karena bagi kelompok tengah tersebut, bisa saja kegiatan tumpangsari hanya dijadikan kegiatan pelengkap sehingga berapa pun hasil dari tumpangsari tidak begitu mempengaruhi kondisi rumah tangga mereka.

Sama halnya dengan kelompok paling miskin, dalam kelompok agak miskin baik mereka yang tidak puas maupun yang puas menunjukkan perbandingan persentase yang sama, masing-masing 16%. Mungkin mereka yang tidak puas, adalah karena kegiatan tumpangsari lahan hutan tidak begitu memberikan hasil yang maksimum

Tabel 3. Sikap Peserta Program Tumpangsari terhadap Tingkat Kemanfaatan Program menurut Kelompok Strata (n = 50)

Sikap		Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
Kelompok					
Kelompok Paling Miskin		-	6 (12 %)	6 (12 %)	-
Kelompok Miskin		2 (4 %)	7 (14 %)	12 (24 %)	-
Kelompok Agak Miskin		-	8 (16 %)	8 (16 %)	1 (2 %)

Sumber : Survey Pribadi, 2001.

Di kelompok miskin atau tengah, sikap mereka terlihat lebih bervariasi. Ada 4% responden yang menyatakan sangat tidak puas dan 14% menyatakan tidak puas. Namun demikian, persentase terbesar justru ditempati oleh mereka yang merasakan cukup puas

dibanding dengan ongkos dan tenaga yang mereka keluarkan. Apalagi, luas lahan tumpangsari yang sangat minim (rata-rata andil untuk kelompok tersebut adalah 0,23 ha), tentunya memberi hasil yang juga relatif minim.

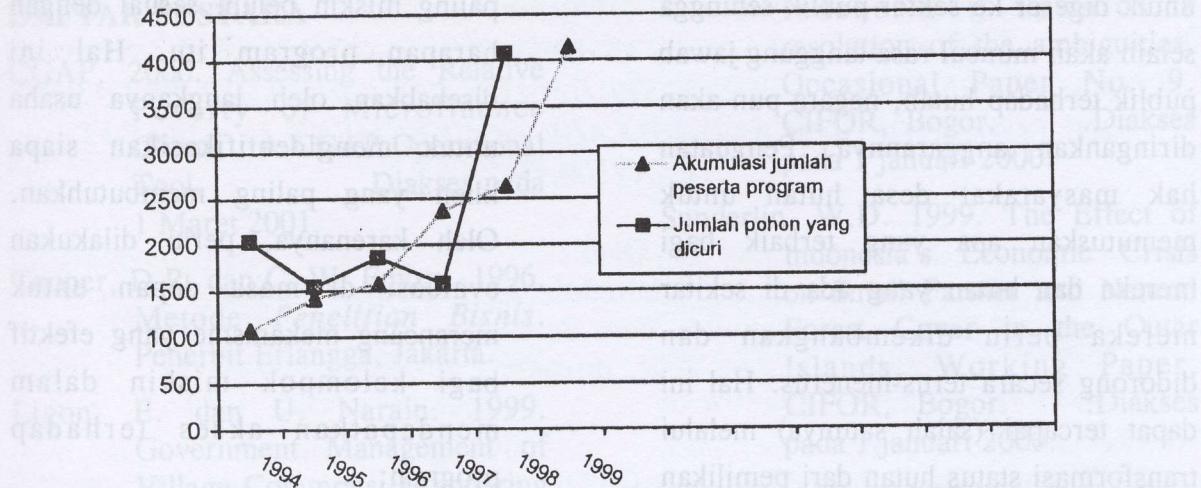
Tabel 4. Perolehan Luas Andil dan Rata-rata Andil menurut Kelompok Strata (n = 50)

Luas Andil	0,07-0,25	0,25-0,28	0,28-0,35	Rata-rata (ha)
kelompok				
Kelompok Paling Miskin	1 (2 %)	11 (22 %)	-	0,24
Kelompok Miskin	8 (16 %)	13 (26 %)	-	0,20
Kelompok Agak Miskin	4 (8 %)	11 (22 %)	2 (4 %)	0,23

Sumber : Survey Pribadi, 2001.

Bagaimana implikasi sikap terhadap kemanfaatan program tersebut bagi pengembangan tanggung jawab peserta program terhadap keamanan hutan? Hasil survei menunjukkan 67,3% responden tidak setuju bila mereka harus bertanggung jawab terhadap gangguan hutan oleh ulah manusia seperti pencurian kayu atau penjarahan lahan. Hanya 41% dari mereka yang merasa bertanggung jawab bila terjadi gangguan manusia atas hutan. Data ini memberikan implikasi bahwa program belum sepenuhnya --- meskipun telah memberikan kepuasan relatif bagi sebagian pihak --- mampu menciptakan *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dari peserta program terhadap berbagai bentuk gangguan hutan.

Akibat rendahnya rasa tanggung jawab tersebut, tingkat gangguan hutan oleh ulah manusia cenderung makin meningkat. Ironisnya, kecenderungan kerusakan hutan yang dicerminkan oleh pencurian kayu cenderung meningkat drastis seiring dengan bertambahnya jumlah peserta program (petani lahan hutan) dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah peserta program tumpangsari belum menjadi jaminan amannya hutan. Bahkan peningkatan jumlah kayu yang dicuri membubung hampir empat kali lipat (dari 1.574 pohon menjadi 4.076 pohon) antara tahun 1997 - 1998 seiring dengan meluasnya dampak krisis ekonomi. Lebih jelasnya dapat disimak dari bagan di bawah ini.



Gambar 4. Akumulasi Jumlah Peserta Program dan Jumlah Pohon yang Dicuri di Wilayah KPH Banyumas Timur 1994-1999 (Sumber : Laporan Tahunan KPH Banyumas Timur)

Makna apa yang dapat ditarik dari data di atas? Data di atas menunjukkan bahwa model pengelolaan hutan, baik melalui program tumpangsari biasa maupun perhutanan sosial, ternyata belum mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling miskin. Di samping itu, sisi kelembagaan yang dibangun juga belum mampu menciptakan rasa tanggung jawab peserta program terhadap kelestarian hutan. Selama ini, masyarakat desa hutan yang terlibat sebagai peserta program tidak memiliki kekuatan apa pun dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan hanya sebatas pada tahap pelaksana seperti proses pembagian lahan dan penggarapan lahan. Akibatnya, begitu kontrak lahan selesai mereka akan meninggalkan lahan begitu saja dan semua tanggung jawabnya terhadap keamanan hutan diserahkan kembali ke pihak

aparatus Perhutani. Oleh karena itu, penyempurnaan sisi kelembagaan di masa depan seperti penerapan konsep pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).

Melalui PHBM, dominasi peran birokrasi kehutanan tidak saja dikurangi tetapi juga peran mereka sebagai pendorong dan pendamping masyarakat dalam mengelola manfaat hutan diubah. Selama ini masyarakat tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan sehingga mereka tidak merasa terikat untuk bertanggung jawab terhadap hutan dari gangguan pihak lain. Ironisnya, tenaga pengaman hutan yang dimiliki birokrasi kehutanan sangat minim. Satu orang petugas bertanggung jawab terhadap keamanan hutan seluas 236 ha (KPH Banyumas Timur). Akibatnya, kondisi hutan berada di luar kemampuan kontrol mereka. Dengan PHBM, kendala semacam ini dicoba

untuk digeser ke sektor publik sehingga selain akan muncul rasa tanggung jawab publik terhadap hutan, negara pun akan diringankan anggarannya. Penguatan hak masyarakat desa hutan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi mereka dan hutan yang ada di sekitar mereka perlu dikembangkan dan didorong secara terus-menerus. Hal ini dapat tercapai (salah satunya) melalui transformasi status hutan dari pemilikan negara (*state property*) menjadi pemilikan masyarakat (*community property*). Transformasi demikian tidak saja akan mengurangi fenomena *open access* seperti kasus pencurian dan penjarahan yang terjadi pada hutan-hutan negara saat ini (Ligon dan Narain 1999) sehingga menimbulkan degradasi hutan, tetapi juga dapat mengurangi pendekatan *top-down* yang *persistent* selama ini serta dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama berembung mengenai cara terbaik dalam pengelolaan hutan menurut kemampuan dan kebutuhan mereka tanpa mengabaikan aspek kelestarian hutan. Dengan cara demikian, tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan dan kelestarian hutan akan berlangsung secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Jangkauan program tumpangsari terhadap kelompok yang relatif

paling miskin belum sesuai dengan harapan program itu. Hal ini disebabkan oleh langkanya usaha untuk mengidentifikasi siapa klien yang paling membutuhkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan evaluasi di masa depan untuk merancang mekanisme yang efektif bagi kelompok miskin dalam mendapatkan akses terhadap program;

2. Salah satu mekanisme potensial untuk membuka akses kelompok miskin terhadap program tumpangsari adalah penerapan konsep PHBM. Melalui PHBM, status pemilikan hutan secara *de facto* dilimpahkan kepada masyarakat sebagai milik bersama sehingga masyarakat sendiri yang memutuskan siapa yang berhak ikut dan bagaimana mengelola lahan secara optimal tanpa harus merusak hutan.

SANWACANA

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Sajogjo atas ulasan yang sangat bermakna dan kritis sebelum hasil penelitian ini dipublikasikan. Berbagai kritik dan saran dari peserta seminar lintas bidang juga sangat membantu khususnya dalam memahami latar permasalahan, untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- CGAP. 2000. Assessing the Relative Poverty of Microfinance Clients : A CGAP Operational Tool. . Diakses pada 1 Maret 2001.
- Cooper, D.R. dan C. W. Emory. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ligon, E. dan U. Narain. 1999. Government Management of Village Commons: Comparing Two Forest Policies. *Journal of Environmental Economics and Management* 37, 272-289.
- KPH Banyumas Timur. 1994-1999. Laporan Tahunan KPH Banyumas Timur.
- Norusis, M.J. 1999. *SPSS Regression ModelsTM 10.0*. SPSS Corp.
- Sunderlin, W.D. dan I.A.P. Resosudarmo. 1996. Rates and Causes of Deforestation in Indonesia : Towards a resolution of the ambiguities. Occasional Paper No. 9. CIFOR, Bogor. .Diakses pada 1 januari 2000.
- Sunderlin, W.D. 1999. The Effect of Indonesia's Economic Crisis on Small Farmer and Natural Forest Cover in the Outer Islands. Working Paper, CIFOR, Bogor. .Diakses pada 1 januari 2000.
- . 1997. An Ex-Post Methodology for Measuring Poor People's Participation in Social Forestry : An Example from Java, Indonesia. *Agroforestry Systems* 37: pp. 297-310, Kluwer Publication, The Netherlands.
- Umar, H. 1998. *Riset Sumberdaya Manusia dalam Organisasi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.